

NO	JENIS INFORMASI
9.	<p><i>Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup badan publik Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko</i></p> <p>Berdasarkan Rancangan Perubahan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko, maka program kegiatan yang menjadi ruang lingkup Badan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan indikator capaian programnya yakni meningkatnya kualitas manajemen Pemerintahan Daerah; ➤ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan indikator capaian programnya yakni Persentase sarana dan prasarana aparatur Pemerintah Kabupaten Mukomuko yang baik, dan jumlah sarana dan prasarana meningkatnya kualitas manajemen Pemerintahan Daerah; ➤ Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan indikator capaian programnya yakni Peringkat SAKIP; ➤ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan indikator capaian programnya yakni Proporsi pemenuhan kompetensi SDM Aparatur Keuangan Daerah yang memenuhi standar kompetensi, dan Jumlah kompetensi SDM Aparatur Keuangan Daerah yang memenuhi standar kompetensi; ➤ Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan indikator capaian programnya yakni Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan daerah dan Jumlah Peningkatan Disiplin Aparatur; ➤ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan indikator capaian programnya yakni Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; ➤ Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja, dengan indikator capaian programnya yakni Persentase Penyusunan laporan kinerja dan perjanjian kinerja tepat waktu; ➤ Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan indikator capaian programnya yakni Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan daerah dan Persentase Kenaikan Pendapatan Asli daerah (PAD); ➤ Program Legalisasi Aset Pemerintah dan Masyarakat, dengan indikator capaian programnya yakni Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah.
10.	<p><i>Nama program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko</i></p> <p>Berdasarkan Rancangan Perubahan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko tidak semua program kegiatan dilaksanakan pada tahun 2017, namun ada pada tahun 2018 dan seterusnya sampai dengan tahun 2021. Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan khusus pada tahun 2017 (Berdasarkan RKA Perubahan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017) adalah sebagai berikut :</p>

NO	JENIS INFORMASI	
	No	Program dan Kegiatan
	1.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1) Penyusunan Renstra, Renja Dan Renja Perubahan.
	2.	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja 1) Penyusunan Renstra, Renja Dan Renja Perubahan.
	3.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; 3) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah; 4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; 5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor; 7) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; 9) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan; 11) Penyediaan Makanan dan Minuman; 12) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah; 13) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah; 14) Penyediaan Jasa Kantor; 15) Perayaan Hari-Hari Besar Daerah dan Nasional.
	4.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor; 2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; 5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor; 6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor; 7) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebutuhan Barang Milik Daerah.
	5.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1) Pengadaan Pakaian Kerja; 2) Bimbingan Teknis Aparatur Pengelola Aset Daerah.
	6.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1) Bimbingan Teknis Aparatur Pengelola Aset Daerah.
	7.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1) Penyusunan Laporan Dana Transfer; 2) Penyusunan Laporan Rekonsiliasi APBD; 3) Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan dan Semesteran; 4) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
	8.	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1) penyusunan standar satuan harga; 2) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD; 3) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD; 4) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD; 5) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD;

NO	JENIS INFORMASI
	<ul style="list-style-type: none"> 6) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 7) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 8) Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah; 9) Penyusunan KUA-PPAS, dan KUA-PPA Perubahan serta Pembahasan RKA dan RKA Perubahan; 10) Pengelolaan dan Peningkatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA); 11) Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pergeseran APBD; 12) Penyusunan Standar Biaya Umum; 13) Penyusunan Standar Prosedur Keuangan Daerah; 14) Sensus Barang Milik Daerah; 15) Penghapusan Barang Milik Daerah; 16) Penyusunan Buku Inventaris Barang Milik Daerah; 17) Cetak Massal SPPT, STTS dan DHKP PBB-P2; 18) Penyampaian SPPT, STTS dan DHKP PBB-P2; 19) Penetapan Objek Pajak Daerah; 20) Penagihan Objek Pajak Daerah; 21) Penyuluhan Pajak Daerah; 22) Pendataan Subjek dan Objek Pajak Daerah; 23) Pengelolaan Basis Data SISMIOP; 24) Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMDA PENDAPATAN); 25) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD); 26) Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah; 27) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah; 28) Pemberian Penghargaan Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 29) Validasi Data PBB; 30) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 31) Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; 32) Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; 33) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 34) Peningkatan Manajemen Aset.
9.	<p>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Updating Sistem Komputerisasi Gaji PNS; 2) Verifikasi dan Penatausahaan Penerbitan Belanja Daerah; 3) Penguatan Administrasi Pengelolaan Kas Daerah; 4) Penyusunan Pelaporan Daftar Transaksi Harian (DTH) dan Realisasi Transaksi Harian (RTH); 5) Penyediaan dan Penatausahaan Surat Penyediaan Dana.
10.	<p>Program Legalisasi Aset Pemerintah dan Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Penertiban Data Administrasi Pertanahan; 2) Sertifikasi Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.

NO	JENIS INFORMASI
11.	<p><i>Penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko</i></p> <p>Dengan memperhatikan program dan dan kegiatan tahun 2017 pada poin 9, dan mempedomani Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-576 Tahun 2017 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-12 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendaharan Pengeluaran Pembantu dan Bendaharan Penerimaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017, Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 900-64 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 900-04 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 900-183 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 900-21.a Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko, maka pejabat pengelola masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :</p>